

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini Indonesia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, bahkan sampai pada level krisis lingkungan yang tengah dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka teori politik hijau sangat penting untuk diterapkan dalam ideologis partai politik. Karena menawarkan pendekatan holistik dan sistemik untuk isu lingkungan dan sosial, yang sangat diperlukan untuk menangani tantangan global saat ini. Teori politik hijau juga dikenal sebagai teori politik ekologi atau eco-politics, adalah serangkaian gagasan dan nilai yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Teori politik hijau berargumen bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam dan bahwa isu lingkungan harus menjadi fokus sentral dalam pengambilan keputusan politik (Goodin, R. E., 2013).

Di dalam teori politik hijau terdapat keyakinan bahwa masalah lingkungan secara fundamental adalah masalah politik dan tidak dapat dipecahkan hanya dengan kekuatan pasar atau teknologi semata. Sebaliknya para teoretikus politik hijau menganjurkan perubahan sistemik dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil. Secara keseluruhan teori politik hijau sangat penting karena menawarkan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan inklusif untuk menangani tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks dan saling terkait (Ottuh, P., 2020).

Di Kabupaten Majalengka sendiri sejak dilakukannya penelitian, telah banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Isu yang menjadi perhatian utama adalah penebangan pohon besar telah menjadi sorotan utama yang memicu kekhawatiran akan keberlanjutan lingkungan, tren peningkatan penebangan pohon telah mengancam keberlangsungan ekologi dan mengakibatkan terkikisnya ruang terbuka hijau yang sangat berharga bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Majalengka, melalui web opendata menampilkan ketersediaan luasan ruang terbuka hijau (rth) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

seperti berikut :

**Tabel 1.1 Luasan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Majalengka Dari Tahun 2023.**

Data Luasan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Majalengka Dari Tahun 2023.			
Nama Kecamatan	Luas	Satuan	Tahun
ARGAPURA	3,11	KILOMETER	2023
BANJARAN	1,91	KILOMETER	2023
BANTARUJEG	2,09	KILOMETER	2023
CIGASONG	1,44	KILOMETER	2023
CIKIJING	1,74	KILOMETER	2023
CINGAMBUL	2,87	KILOMETER	2023
DAWUAN	0,37	KILOMETER	2023
JATITUJUH	3,33	KILOMETER	2023
JATIWANGI	2,21	KILOMETER	2023
KADIPATEN	2,91	KILOMETER	2023
KASOKANDEL	2,84	KILOMETER	2023
KERTAJATI	28,79	KILOMETER	2023
LEMAHSUGIH	2,29	KILOMETER	2023
LEUWIMUNDING	1,62	KILOMETER	2023
LIGUNG	3,69	KILOMETER	2023
MAJA	1,53	KILOMETER	2023
MAJALENGKA	2,04	KILOMETER	2023
MAL AUSMA	2,91	KILOMETER	2023
PALASAH	3,12	KILOMETER	2023
PANYINGKIRAN	2,18	KILOMETER	2023
RAJAGALUH	1,23	KILOMETER	2023

SINDANG	1,03	KILOMETER	2023
SINDANGWANGI	2,03	KILOMETER	2023
SUKAHAJI	2,13	KILOMETER	2023
SUMBERJAYA	2,93	KILOMETER	2023
TALAGA	1,55	KILOMETER	2023

*Sumber : <https://opendata.majalengkakab.go.id/dataset/luasan-ruang-terbuka-hijau-rth-publik-sebesar-20-dari-luas-wilayah-kotakawasan-perkotaan-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-majalengka>*

Berdasarkan data luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wilayah menunjukkan luas yang relatif sempit. Dari data yang diberikan, sebagian besar kecamatan memiliki luas ruang terbuka hijau di bawah 3 kilometer persegi, dengan beberapa kecamatan bahkan memiliki luas yang jauh lebih kecil dari itu. Contohnya, Kecamatan Dawuan hanya memiliki luas 0,37 kilometer persegi, sementara Kecamatan Sindang hanya memiliki luas 1,03 kilometer persegi. Hanya sedikit kecamatan yang memiliki luas ruang terbuka hijau melebihi 3 kilometer persegi, seperti Kecamatan Kertajati yang memiliki luas mencapai 28,79 kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah di Kabupaten Majalengka memiliki luas ruang terbuka hijau yang terbatas. Hal ini memiliki implikasi yang penting dalam konteks pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis bagi masyarakat lokal.

Meskipun pada tahun 2023, Kabupaten Majalengka telah menetapkan target memiliki luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari total luas wilayah kota/kawasan perkotaan berdasarkan kecamatan, namun realitasnya menunjukkan ketidaksesuaian antara data yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi.

**Tabel 1.2 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang Seharusnya Tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka**

Data Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang Seharusnya Tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka			
Nama Kecamatan	Luas	Satuan	Tahun
ARGAPURA	4,66	KILOMETER	2023
BANJARAN	2,87	KILOMETER	2023
BANTARUJEG	3,14	KILOMETER	2023
CIGASONG	2,16	KILOMETER	2023
CIKIJING	2,61	KILOMETER	2023
CINGAMBUL	4,31	KILOMETER	2023
DAWUAN	0,55	KILOMETER	2023
JATITUJUH	5	KILOMETER	2023
JATIWANGI	3,32	KILOMETER	2023
KADIPATEN	4,37	KILOMETER	2023
KASOKANDEL	4,26	KILOMETER	2023
KERTAJATI	43,19	KILOMETER	2023
LEMAHSUGIH	3,44	KILOMETER	2023
LEUWIMUNDING	2,43	KILOMETER	2023
LIGUNG	5,54	KILOMETER	2023
MAJA	2,29	KILOMETER	2023
MAJALENGKA	3,06	KILOMETER	2023
MAL AUSMA	4,36	KILOMETER	2023
PALASAH	4,68	KILOMETER	2023
PANYINGKIRAN	3,27	KILOMETER	2023
RAJAGALUH	1,84	KILOMETER	2023
SINDANG	1,54	KILOMETER	2023

SINDANGWANGI	3,05	KILOMETER	2023
SUKAHAJI	3,2	KILOMETER	2023
SUMBERJAYA	4,4	KILOMETER	2023
TALAGA	2,32	KILOMETER	2023

Sumber : <https://opendata.majalengkakab.go.id./dataset/luasan-ruang-terbuka-hijau-rth-publik- yang-seharusnya-tersedia-di-wilayah-kotakawasan-perkotaan-berdasarkan-kecamatan- di-kabupaten-majalengka>

Dari data yang tersedia, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Majalengka memiliki perbedaan antara luas ruang terbuka hijau (RTH) yang sebenarnya dengan yang seharusnya tersedia. Perbedaan ini mengindikasikan apakah terdapat surplus atau defisit dalam ketersediaan RTH di masing-masing kecamatan. Dalam konteks ini, bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Majalengka mengalami defisit dalam ketersediaan RTH. Dan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki defisit yang tinggi, seperti Kecamatan Kertajati yang memiliki defisit sebesar 14,40 km<sup>2</sup>. Misalnya, Kecamatan Argapura memiliki defisit RTH sebesar 1,55 km<sup>2</sup>, Banjaran dengan defisit 0,96 km<sup>2</sup>, Bantarujeg dengan defisit 1,05 km<sup>2</sup>, dan sebagainya.

Jika dijumlahkan semua defisit RTH dari setiap kecamatan, dapat ditemukan bahwa luas total RTH yang sebenarnya tersedia di Kabupaten Majalengka kurang dari yang seharusnya ada menurut standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka. Defisit ini dapat memiliki dampak negatif pada kualitas lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan tindakan yang tepat dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau di wilayah ini guna mendukung kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi penduduknya.

Penebangan pohon yang semakin meningkat telah menjadi perhatian utama dalam konteks pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, ada tekanan yang semakin besar

terhadap sumber daya alam, termasuk ruang terbuka hijau. Aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan konversi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan pertanian atau perkebunan, serta kerusakan habitat yang luas. (Adiyanta, F. S. 2018)

Penyebab dari peningkatan penebangan pohon di Kabupaten Majalengka sangat beragam. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan peningkatan permintaan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian, yang sering kali mengakibatkan tekanan yang besar terhadap hutan dan ruang terbuka hijau. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan transportasi juga berkontribusi pada deforestasi, karena pembukaan akses baru ke wilayah ruang terbuka hijau memicu aktivitas eksploitasi yang lebih besar. (Vikriandi, I. 2020) Penebangan pohon di Kabupaten Majalengka memiliki potensi besar pada perubahan iklim lokal. Ruang terbuka hijau yang berada di daerah ini tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Dengan penebangan yang semakin meningkat, terjadi penurunan signifikan dalam kemampuan ruang terbuka hijau untuk menyerap karbon dari atmosfer, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di udara.

Terkikisnya ruang terbuka hijau sebagai penyerap karbon alami dapat memperburuk masalah perubahan iklim di Kabupaten Majalengka. Dengan berkurangnya luas ruang terbuka hijau dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas penebangan, suhu udara di wilayah tersebut cenderung meningkat. Perubahan suhu ini dapat mengganggu pola cuaca lokal, meningkatkan kecenderungan terjadinya cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang, serta memengaruhi produktivitas pertanian dan keberlangsungan sumber daya alam lainnya (Yenri, E. 2023).

Dampak perubahan iklim lokal tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Degradasi lingkungan hidup yang disebabkan oleh penebangan pohon yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang

(Siswoko, B. D. 2008). Oleh karena itu, upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengurangi penebangan pohon dan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Kabupaten Majalengka dan melindungi masa depan generasi yang akan datang.

Hal tersebut pun terlihat dari tingkat suhu yang semakin memanas. Dilansir dari GoodStats menyatakan bahwa Majalengka berada pada urutan ketiga terpanas dari seluruh wilayah di Indonesia.

**Tabel 1.3 Wilayah terpanas di Indonesia**

Peringkat	Wilayah	Suhu Derajat Celcius
1.	Semarang (Jawa Tengah)	36,6
2.	Palembang (Sumatera Selatan)	36,4
3.	<b>Majalengka (Jawa Barat)</b>	<b>36,3</b>
4.	Belitung (Bangka Belitung)	36,1
5.	Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	35,7
6.	Sumbawa (Nusa Tenggara Barat)	35,6
7.	Banjarbaru	35,6
8.	Palu (Sulawesi Tengah)	35,6

Sumber : <https://goodstats.id/infographic/wilayah-terpanas-di-indonesia->

oktober-2023-wnhFv  
 KEMENTERIAN NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui dan memahami dampak penebangan pohon terhadap perubahan iklim lokal serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global dan menjaga keseimbangan ekologis di Kabupaten Majalengka. Ini memerlukan tindakan kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi hutan-hutan yang tersisa dan mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis teori politik hijau sangat penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majalengka. Teori politik hijau menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai landasan bagi pembangunan (Low, N. 2021). Dalam konteks

ini, penebangan pohon di Kabupaten Majalengka menjadi perdebatan yang kompleks antara kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan keharusan untuk melindungi ekosistem yang rapuh. Dengan populasi yang terus berkembang dan permintaan akan kayu yang meningkat, tekanan terhadap hutan dan ruang terbuka hijau semakin meningkat.

Tantangan terbesar dalam menangani masalah ini adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sistem politik di Kabupaten Majalengka harus mampu menciptakan kebijakan yang mendorong praktik pembangunan yang ramah lingkungan dengan menekankan penerapan kebijakan-kebijakan insentif untuk mendorong praktik-praktik ramah lingkungan di sektor swasta. Ini bisa berupa pemberian subsidi untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian alam. Dengan memberikan insentif yang tepat, pemerintah dapat merangsang inovasi dan investasi dalam pembangunan ramah lingkungan., sambil memberikan insentif kepada industri untuk beralih ke model yang lebih berkelanjutan. Diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap ruang terbuka hijau menjadi krusial. Kebijakan dan regulasi yang kuat perlu diterapkan untuk melindungi hutan dan lahan hijau dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut, sambil memberikan dukungan dan insentif kepada mereka yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka ini masih terus berjuang dengan kurangnya regulasi yang memadai dalam mengatur penebangan pohon. Hal ini memberikan celah bagi praktik-praktik penebangan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan sumber daya alam. Meskipun telah menjadi perhatian utama bagi banyak aktivis lingkungan dan ahli kebijakan, belum adanya regulasi khusus berupa juknis yang berasal dari Dinas Lingkungannya langsung. Yang secara keseluruhan melindungi dari praktik penebangan pohon dan menjamin keseimbangan pembangunan berbasis ramah

lingkungan, oleh karena itu rentan terhadap eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alamnya. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 Bagian Keenam yang mengatur tentang Tertib Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Jalur Hijau, dan Ruang Publik, namun implementasi kebijakannya masih menemui sejumlah kendala. Salah satu ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik yang terjadi adalah terkait dengan penebangan pohon. Pasal 21 dari Perda tersebut menegaskan bahwa menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman hanya boleh dilakukan untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini. Penebangan pohon seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan dinas atau keselamatan manusia, melainkan lebih didorong oleh kepentingan ekonomi atau proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Data tentang persentase ruang terbuka hijau yang minim di Kabupaten Majalengka menyoroti adanya ketidaksiharan dalam implementasi kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah setempat. Meskipun kebijakan telah diatur melalui Peraturan Daerah terkait Tertib Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Jalur hijau, dan Ruang Publik, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kurangnya kontrol yang ketat serta sanksi yang tegas bagi pelanggar, maka kebijakan tersebut cenderung hanya menjadi peraturan yang kurang menunjukkan indikasi peimplementasian yang mumpuni tanpa memberikan dampak nyata dalam perlindungan ruang terbuka hijau. Selain itu, kemungkinan adanya interpretasi yang tidak konsisten atau perbedaan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda juga dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta instansi terkait mengenai pentingnya mematuhi regulasi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan upaya yang lebih serius dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi

terkait.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tersedianya data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki persentase ruang terbuka hijau yang terbilang minim menambah kompleksitas dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Dengan sedikitnya ruang terbuka hijau, setiap langkah dalam pengelolaan ruang di Majalengka harus dipertimbangkan secara matang untuk memastikan kelangsungan hidup lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tanpa pedoman yang jelas, penebangan pohon dapat dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang signifikan, seperti erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal. Selain itu, kurangnya regulasi juga meningkatkan risiko konflik antara pemangku kepentingan yang berbeda. Para petani yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka mungkin merasa terdesak untuk menebang pohon demi mendapatkan penghasilan, sementara kelompok-kelompok lingkungan dan masyarakat adat dapat merasa terancam oleh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Ketidakefektifan dalam mengatur penebangan pohon juga memperburuk masalah deforestasi yang sudah ada. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hutan-hutan di Kabupaten Majalengka terus mengalami tekanan dari pembangunan infrastruktur, perambahan lahan, dan konversi kegiatan pertanian yang tidak berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya terasa secara lokal, tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekologi regional dan bahkan global. Selain itu, ketiadaan peraturan juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku industri. Tanpa kejelasan tentang batasan dan persyaratan yang diperlukan, mereka mungkin enggan untuk berinvestasi dalam praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan atau untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang lebih berkelanjutan (Haq, H. D. 2023). Langkah-langkah konkrit yang dapat diambil termasuk

mengidentifikasi dan melindungi area hijau yang tersisa, mendorong penanaman kembali pohon yang telah ditebang, dan mengatur kegiatan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau tetap terjaga dan terbuka bagi masyarakat.

Dalam menyingkapi berbagai permasalahan mengenai lingkungan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka disini peran aktor politik sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab terkait arus dari pola kehidupan masyarakat yang terjadi. Apakah kebijakan yang ditegakkan akan membawa dampak yang membawa kondisi lingkungan menjadi membaik atau justru pada arah sebaliknya yakni merusak lingkungan dan akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini pun haruslah berdasar atas kesadaran bahwa kehidupan manusia dan kondisi alam merupakan dua komponen yang berkesinambungan. Yang dimana jika ditilik dari teori politik hijau yakni menurut (Tim Hayward, 2005) bahwa secara fakta manusia itu adalah bagian dari alam, yang sehingga dapat berimplikasi pada perilaku politiknya (Dobson, A., 1999). Berdasar atas argumen tersebut, teori politik haruslah selaras dengan teori lingkungan yang berarti bahwa manusia itu tidak dilihat sebagai makhluk individu yang rasional atau sebagai makhluk sosial namun sebagai *natural being*. Berdasarkan pernyataan tersebut, aktor politik yang dimaksud disini ialah partai-partai yang sudah berperan aktif dalam perubahan di masyarakat.

Yang mendasari mengapa PDIP menjadi salah satu objek kajian, karena PDI Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Majalengka memiliki basis dukungan yang kuat, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Majalengka tahun 2020, PDIP berhasil memenangkan posisi bupati melalui pasangan Karna Sobahi – Tarsono D. Mardiana, yang merupakan kader PDIP. Selain itu, pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka tahun 2019-2024 (Majalengka BPS, 2019). PDIP juga berhasil meraih suara terbanyak dengan 15 kursi DPRD Kabupaten Majalengka. Meskipun demikian, PDIP harus berkompetisi dengan partai politik lain yang jugamemiliki dukungan yang kuat di Kabupaten Majalengka. Sebagai partai politik yang menganut ideologi nasionalis dan kebangsaan, PDIP di

Kabupaten Majalengka juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan partai PDIP yang memiliki basis kuat di Kabupaten Majalengka ini dapat menjadikan pula isu lingkungan sebagai perhatian dalam pemberdayaan masyarakat.

Serta berdasar dari studi kasus partai Golkar, pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka tahun 2019 (Majalengka BPS, 2019), Golkar berhasil meraih suara ketiga di DPRD Kabupaten Majalengka

dengan perolehan 6 kursi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Golkar masih menjadi partai politik yang populer di Kabupaten Majalengka,

meskipun harus bersaing dengan partai politik lain yang memiliki basis dukungan yang kuat.

**Tabel 1.4 Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka Periode 2019- 2024**

Peringkat	Partai	Perolehan Kursi
1.	PDI-P	15 Kursi
2.	Gerindra	7 Kursi
3.	Golkar	6 Kursi
4.	PAN	5 Kursi
5.	PKB	5 Kursi
6.	PKS	5 Kursi
7.	NasDem	3 Kursi
8.	Demokrat	2 Kursi
9.	PPP	2 Kursi

Sumber: [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Majalengka](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Majalengka)

Sebagai partai politik yang berasal dari kalangan pebisnis dan pengusaha, Golkar di Kabupaten Majalengka menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas utama dalam memajukan daerah. Selain itu, Golkar juga mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan akses terhadap layanan publik.

Meskipun demikian, Golkar juga diharapkan dapat memperhatikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian masyarakat terutama di era pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, diharapkan Golkar dapat terus memperoleh dukungan dari masyarakat dan menjalankan perannya sebagai partai politik yang mampu mewakili kepentingan rakyat secara lebih baik di Kabupaten Majalengka.

Maka, politik hijau bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kebijakan yang mendukung sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang bijaksana diadopsi, dampak positifnya akan terasa meluas ke berbagai sektor. Dalam sebuah artikel opini di *The Guardian* (Smith, 2023). Diungkapkan bahwa politik hijau tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam mengurangi polusi dan dampak lingkungan, tetapi juga membantu dalam menciptakan lapangan kerja baru, merangsang inovasi teknologi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengulas lebih spesifik dengan menghadirkan judul penelitian “Studi Politik Hijau Partai Politik Indonesia Mengenai Kesadaran Politik Yang Prolingkungan (Studi kasus partai PDIP dan Golkar di Kabupaten Majalengka)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partai PDIP dan Golkar kabupaten Majalengka merespon terhadap permasalahan lingkungan?
2. Sejauh mana keterlibatan partai PDIP dan Golkar dalam kebijakan lingkungan di Kabupaten Majalengka?

3. Bagaimana Inisiatif dan tindakan nyata seperti apa yang dilakukan oleh partai PDIP dan Golkar mengenai lingkungan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kesadaran politik yang prolingkungan PDIP dan Golkar.
2. Untuk mengetahui Isu lingkungan apa yang sudah di tangani oleh kedua partai tersebut.
3. Untuk mengetahui gerakan yang dilakukan oleh kedua partai tersebut dalam membawa masyarakat menjaga lingkungan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentu memberikan manfaat yang dapat diberikan yang diantaranya adalah :

#### **1. Manfaat teoritis**

Untuk manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini, ialah dengan harapan penelitian ini dapat menjadi suatu pengetahuan baru mengenai kesadaran prolingkungan yang dilakukan oleh partai politik yang ada di kabupaten Majalengka yang didampingi dengan teori-teori yang mendukung selama proses perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan suatu refleksi bagi pemangku kebijakan di Indonesia agar lebih mawas diri dan tidak menitik beratkan pada satu aspek kepentingan saja melainkan melihat pula pada urgensi krisis lingkungan yang terjadi.

### **1.5 Kerangka Berpikir**

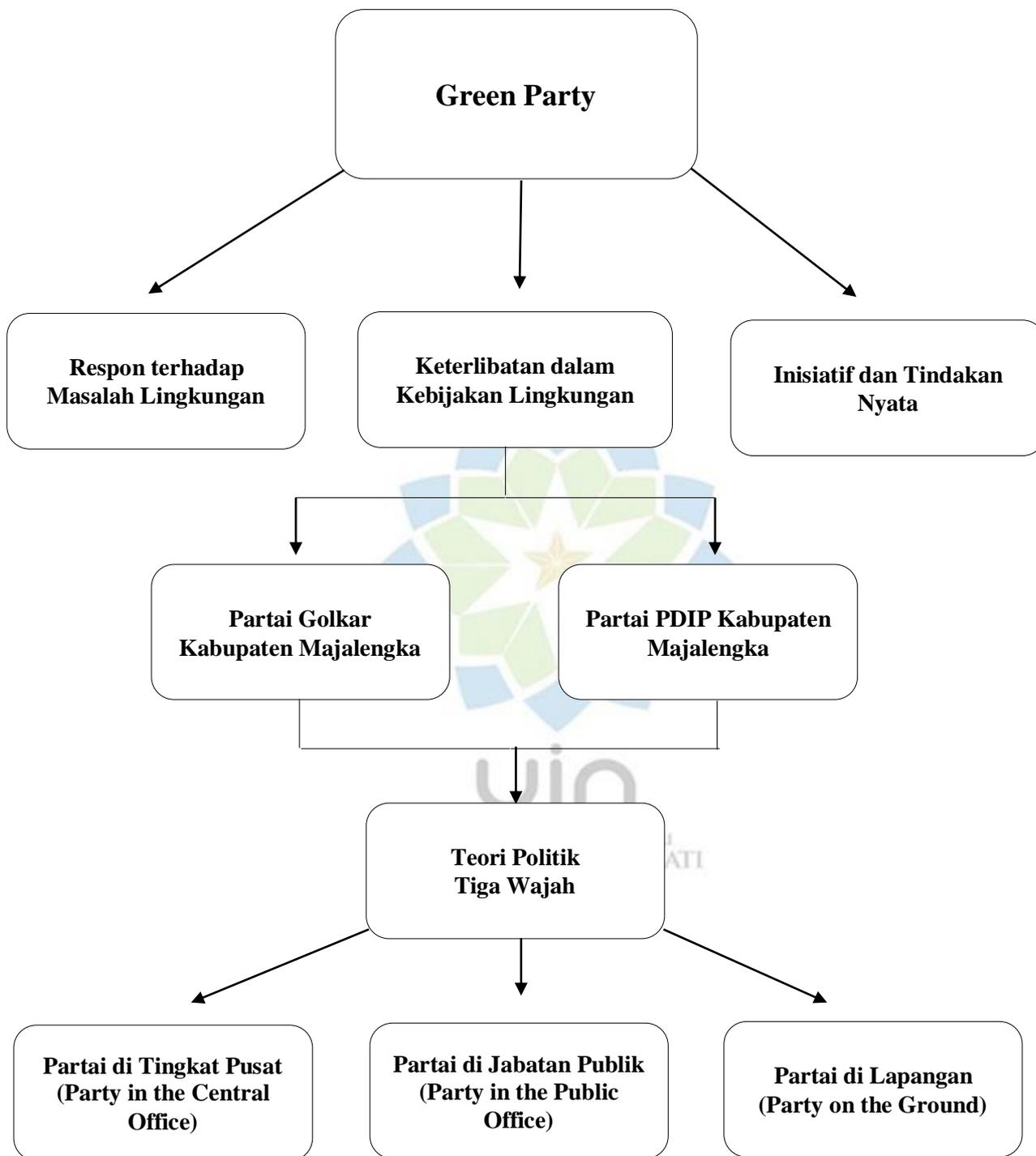
Ditengah perubahan iklim yang semakin nyata dan masalah lingkungan yang semakin medesak, konsep politik hijau dan peran partai politik menjadi dua hal yang berkesinambungan. Politik hijau menekankan perlunya menjaga dan melestarikan lingkungan alam sebagai prioritas utama, sambil tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran penting. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang mendukung lingkungan dan berkelanjutan. Dengan hal ini bagaimana partai-partai politik di Indonesia merespons dan memimpin dalam isu-isu lingkungan akan sangat memengaruhi masa depan ekologi negara ini.

Oleh karena itu dengan menggunakan *Green Party* yang menjadikan lingkungan sebagai asas dalam pembentukan kebijakan, dapat menjadikan aspek ini sebagai salah satu media dalam berkampanye oleh partai PDIP dan Golkar di Kabupaten Majalengka. Dengan hal ini keadaan politik yang prolingkungan akan terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian tindakan ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Dalam kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa teori *Green party*, sebagai landasan konseptual, menyoroti pentingnya keselarasan antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan manusia, dan keadilan sosial. Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab kita terhadap lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebijakan yang perlu diintegrasikan ke dalam struktur dasar sistem politik. Dalam teori ini, Partai Hijau adalah sebuah organisasi politik yang menegaskan komitmennya terhadap isu-isu lingkungan sebagai fokus utama dalam agenda dan kebijakan mereka. Tujuan utama pendirian Partai Hijau adalah untuk mengadvokasi masalah lingkungan dan keberlanjutan, sekaligus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, Partai Hijau juga bersikap proaktif dalam kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Keberadaan Partai Hijau tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, melainkan telah merambah ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dengan menerapkan tiga Indikator Green party pertama, respon terhadap masalah lingkungan. Partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam merespons dan mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, respons yang bijak dari partai politik diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif. Pentingnya edukasi lingkungan juga harus diakui dan ditekankan oleh partai politik. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta konsekuensi dari perilaku yang merugikan alam. Partai politik dapat mempromosikan program pendidikan lingkungan yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kesadaran kolektif. Partai politik juga perlu memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Kedua, keterlibatan dalam kebijakan lingkungan Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan di berbagai tingkatan

pemerintahan. Keterlibatan mereka dapat mencakup penyusunan regulasi, advokasi isu-isu lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Partai-partai politik yang memprioritaskan lingkungan biasanya berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam, memitigasi dampak negatif terhadap ekosistem, dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari keterlibatan partai politik dalam kebijakan lingkungan adalah penyusunan regulasi yang bersifat proaktif dalam melindungi alam. Partai-partai yang peduli terhadap lingkungan berupaya untuk menciptakan undang-undang yang mengatur penggunaan sumber daya alam, perlindungan habitat, dan pembatasan terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan.

Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, partai politik yang berkomitmen pada isu lingkungan juga berperan sebagai advokat dan pemimpin opini dalam menyuarakan isu-isu penting terkait dengan lingkungan. Mereka dapat mengorganisir kampanye penyuluhan, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pada tingkat pemerintahan lokal, partai-partai tersebut mungkin berkolaborasi dengan kelompok masyarakat, LSM, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam hal keberlanjutan lingkungan. Partai politik yang peduli terhadap lingkungan juga dapat memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan lingkungan. Mereka dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintahan dalam hal pelestarian lingkungan. Ketiga, yakni inisiatif dan tindakan nyata, Partai Politik di Indonesia harus mulai mengambil inisiatif dan tindakan nyata untuk mengatasi masalah lingkungan sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini dalam hal keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam dan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang dimana ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh partai Golkar dan PDIP kabupaten Majalengka dengan menggunakan analisis teori tiga wajah.

## 1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian peneliti mengenai Studi Politik Hijau Partai Politik Indonesia Mengenai Politik Yang Prolingkungan ini didorong dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber inspirasi penulisan diantaranya :

**Pertama**, peneliti menjadikan bahan penelitian dari salah satu sumber yang ditulis oleh SUPRATIWI, S. (2011). Penelitian ini berjudul Studi Tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik Yang Prolingkungan Di Kota Semarang. Bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana partai politik di Kota Semarang menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Pokok masalah yang diangkat adalah kurangnya perhatian partai politik terhadap masalah lingkungan, yang terlihat dari visi dan misi mereka. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap dokumen-dokumen partai dan wawancara dengan anggotanya, penelitian ini menemukan bahwa visi partai-partai tersebut cenderung tidak mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan. Mereka lebih fokus pada isu-isu nasional yang umum, seperti hak dan keadilan masyarakat, yang sering kali tidak spesifik menyentuh masalah lingkungan.

**Kedua**, peneliti pun menjadikan salah satu sumber yang ditulis oleh Bolqiah, L. Dengan judul penelitian “Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia”. Pada tulisan ini membahas dominasi oligarki dalam politik Indonesia dan bagaimana hal ini menghambat munculnya partai politik yang benar-benar peduli pada isu-isu lingkungan. Pokok masalahnya adalah bagaimana oligarki memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan kekuasaan dan pendapatan, sementara isu-isu lingkungan sering kali diabaikan. Dengan pendekatan kajian literatur dan analisis konten terhadap undang-undang serta wawancara dengan pengamat politik, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kendali oligarki yang kuat. Mereka menggunakan sumber daya alam sebagai alat untuk mempertahankan status quo, yang berdampak pada ketimpangan materi dan korupsi.

**Ketiga**, peneliti pun mengangkat salah satu sumber tinjauan terdahulu lainnya yang ditulis oleh Sahati, K. J, dkk (2022). Dengan judul “Perbandingan Strategi Kampanye Partai PDI-P Dan Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019”. Dalam jurnal ini membandingkan strategi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dalam memperebutkan calon yang diusungnya pada Pileg 2019 di kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kedua belah pihak hampir sama. Secara keseluruhan, kedua partai memaksimalkan peran struktur partai di tingkat daerah dengan memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi kampanye dan pemasangan baliho. Perbedaannya hanya pada isu yang diangkat dalam kampanye. Bagi PDIP, isukampanyenya adalah mengangkat tiga isu utama, yakni persoalan infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, dan air minum. Sedangkan di bidang sosial, PDIP menimbulkan masalah kesejahteraan pemerintah dan masalah perekonomian ketika harga pasar turun, misalnya barang turun. Selain itu, karena PDIP merupakan partai pengusung calon presiden dan wakil presiden, maka pihaknya juga mempertanyakan kaderisasi calon presiden dan wakil presidennya.

**Keempat**, selanjutnya mengenai fungsi dari partai politik mengenai lingkungan hidup. Yang dimana, ditulis oleh Utama, M. C. (2022). Dalam tulisan tersebut membahas “Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana partai politik dapat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Menggunakan metode analisis kebijakan dan wawancara dengan anggota partai serta aktivis lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun partai politik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan, fungsi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Salah satu contoh yang disebutkan adalah Partai Gerindra, yang mulai menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan melalui indikator kinerja yang lebih baik, meskipun masih dalam tahap awal. Fungsi partai politik sangat strategis untuk memberikan arah politik yang lebih baik. Jika fungsi ini bisa maksimal maka kerja pemerintah juga akan terbantu, khususnya di bidang lingkungan hidup, yang memerlukan upaya bersama, saling melengkapi, dan

koheren. Karena kita sama-sama tahu bahwa permasalahan lingkungan hidup semakin banyak diperbincangkan dan tidak hanya sekedar dibicarakan namun kita sudah mulai merasakan dampak negatif dari kerusakan yang kita timbulkan. Partai Gerindra yang bisa dibilang terbilang baru, dalam pernyataannya menyatakan kepeduliannya terhadap Partai Gerindra melalui gambaran respon indikator kinerjalingkungan hidup partai tersebut.

**Kelima**, sumber selanjutnya yang dijadikan sebagai patokan peneliti ialah tulisan yang dimiliki oleh Mondal, M. (2022) dengan judul tulisan “Politik Hijau untuk Bumi yang Lebih Baik” Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana kita harus menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik melalui paradigma baru. bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup planet Bumi. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya gerakan politik hijau dalam mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menggunakan pendekatan teoritis, penelitian ini menggabungkan konsep-konsep green politics dan hak-hak sosial untuk menunjukkan bahwa kepentingan lingkungan dan sosial harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mondal menyarankan bahwa politik hijau bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Paradigma baru instrumen pengambilan keputusan sebagai “*Green Politics*”. Politik hijau adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup planet Bumi dengan cara mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Politik hijau juga memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan sehat dan aman, serta memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam politik hijau, kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan